



**LAPORAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN IV**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya”**.

Laporan evaluasi kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 20 Januari 2025

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
a. Visi dan Misi	7
b. Tujuan Strategis	8
c. Sasaran Strategis	9
d. Indikator Kinerja Utama	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	13
3.2. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	62
LAMPIRAN	

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan evaluasi Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan

e. program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Data Umum Perangkat Daerah

1. Data Kepegawaian

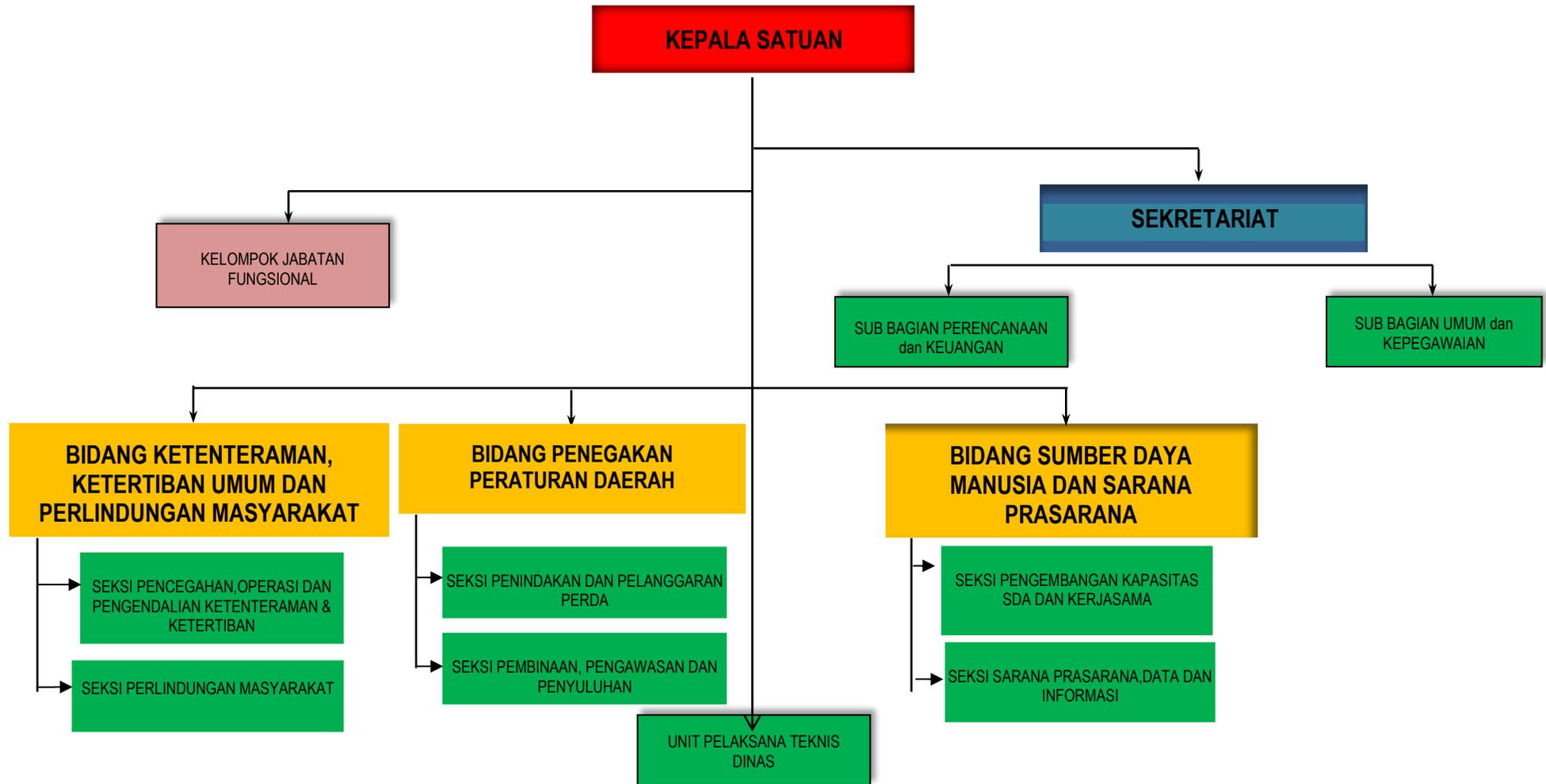
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 228 orang yang terdiri 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 188 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP Tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2024

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	IV	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	III	-	-	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5
3	II	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	-	10	3
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPAH JASA															
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	17	6	2	1	123	36	-	-	-	-	-	142	49
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan IV Tahun 2024

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ES ELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	III.b	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
5	IV.a	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	2	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan IV Tahun 2024

NO.	PEJABAT FUNSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
4	Analisis perencana ahli muda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Arsiparis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Pranata Komputer	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	-	4	2	-	-	6	2	-	-	-	-	10	6

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

"Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG MENGARAH PADA KONDISI YANG AMAN DAN KONDUSIF

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum• Meningkatnya pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal	Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparatur terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama 25%
2		Persentase penurunan	%	Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) –

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		(jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1) x 100%
3		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	%	Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) – (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) x 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparaturnya Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2024 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	74,45 %
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum sesuai standar	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	11,11%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	11,11%
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A kuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	74,45%	77,50%	100%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	11,11	11,09%	99,81%
3		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	11,11	11,11%	100,00%
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50	-	-

N

**Sasaran
Strategis 1**

**Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan
Minimal**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana yang tertuang dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada Kondisi yang aman dan kondusif”. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah atau peraturan Kepala daerah sebagaimana di atur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pada Urusan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Untuk mengukur sasaran tersebut indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Indikator	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
------------------	---

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasar bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum diantaranya Sarana dan prasarana, SDM terlatih, Standar operasional prosedur dan Penerima Layanan dampak akibat dari penegakan hukum Peraturan daerah dan Kepala Daerah. Adapun analisis pencapaian kinerja atas indikator adalah sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	74,45 %	77,50%	100%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum capaian kinerjanya 70,39 % dengan kriteria Sedang

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula :

$\% = \frac{a+b+c+d}{4}$ dengan asumsi masing-masing indikator diberi bobot 25%

a : Persentase SDM aparatur terlatih sebesar 62,34%

b : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal sebesar 47,68%

c : persentase SOP Trantibum yang telah disusun sebesar 100 %

d : persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/Perkada sebesar 100%

Sehingga diperoleh realisasi sebagai berikut :

Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang trantibum = $(62,34\% + 47,68\% + 100 + 100) \times 25\%$
= 77,50%

Berikut uraian data perolehan masing-masing indikator tersebut diatas

➤ **Persentase SDM aparatur terlatih**

Tabel 3.3

Data SDM Satpol PP yang terlatih

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT	YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH SATPOL PP	KETERANGAN
1	ASN	35	4	39	DIKLAT DASAR
2	UPAHJASA	55	150	205	Diklat SAR, Pelatihan Etika Birokrasi, Pelatihan Turjawali, Huru hara
TOTAL		90	154	247	

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase SDM terlatih yaitu dengan cara membagi SDM yang telah mengikuti diklat dengan Jumlah Personil Satpol PP di kali 100% dan diperoleh hasil $154/247 \times 100\% = 62,34 \%$.

➤ **Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal**

Sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2024:

Tabel 3.4

Daftar Sarana Dan Prasarana Minimal s.d Triwulan IV Tahun 2024

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
1	Bangunan Gedung		
	a. Gedung Kantor	2	2

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
	- Ruang kerja pimpinan dan staf	1	1
	- Ruang pos jaga	8	11
	- Ruang rapat	2	2
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	2
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	4
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1
	- Ruang sidang majelis kode etik	0	1
	- Tempat apel/upacara	1	1
	- Halaman parkir	1	1
	b. Gedung UPTD Kecamatan	0	11
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1
	b Mobil Truk Dalmas	1	1
	c. Mobil Pengawalan	1	2
	d. Mobil Patroli	2	2
	e. Mobil operasional kecamatan	0	5
	f. Motor Patwal	2	8
	g. Motor Patroli	21	25
	h. Motor Operasional	2	2

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
3	Perlengkapan Operasional		
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu		
	- PDL	247	247
	- PDU	13	247
	- Sepatu PDL	0	247
	- Topi PDU	13	247
	- baret	247	247
	-perlengkapan pataka	10	10
	tonfa - Tonfa dan holster tonfa	29	100
	- Borgol	0	30
	- Tameng	60	70
	- Senter	0	20
	- ferplas	0	1
	- tas/ ransel	0	20
	- <i>sleeping bag</i>	1	20
	- jaket	0	20
	- rompi <i>body protector</i>	60	60
	- masker	0	20
	- matras/ velbad	30	30

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
	- tenda peleton	4	4
	- tenda Komando	1	3
	- <i>Handy Talkie</i>	10	30
	b. Perengkapan lainnya :		
	- tali carmantel	1	10
	- tandu	4	5
	- Perahu karet	0	3
	- baju pelampung	10	30
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Note Book / Laptop	30	35
	- Computer PC	17	28
	- Printer	24	50
	- AC	21	30
	- Brankas	2	2
	- Faximili	1	1
	- Filling Cabinet	17	25
	- Lemari	6	10
	- Handycam	1	2
	- Kasur	5	25

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
	- Kipas angin	5	10
	- Meja Kantor	43	60
	- Microfon sirene	1	1
	- Tempat Tidur	10	25
	- Sirene/Rotari Mobil	1	1
	- camera	3	3
	- drone	1	1
	- Televisi	8	8
	- Kursi	98	150
TOTAL		1083	2271

Berdasarkan tabel diatas persentase sarana prasarana minimal dihitung dengan formula total sarana dan prasarana dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sesuai standar dikali 100% dan diperoleh hasil : $1083 \times 100\% = 47,68\%$. Sehingga persentase sarana dan prasarana minimal realisasnya untuk s.d Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 47,68 %

➤ **Persentase Standar Operasional Prosedur Trantibum yang terpenuhi**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah dokumen SOP yang di susun dibagi target dokumen SOP yang disusun dikali 100%

Untuk Tahun 2024 ini, target indikator ini sebanyak 40 Dokumen SOP dan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 belum ada

SOP yang disusun dan telah **direalisasikan 40 dokumen SOP** sampai **Triwulan IV Tahun 2024**

➤ **Persentase Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala daerah**

Pengukuran indikator ini melalui perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada di bagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Hukum Penegakan Perda/perkada dikali 100 %

Layanan Dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada yang dimaksud dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga Negara yang terkena dampak baik itu layanan pengobatan maupun layanan kerusakan materiil yang di akibatkan penegakan Peraturan daerah/Perkada.

Hal-hal yang dapat dapat menyebabkan dampak penegakan Peraturan Daerah diantaranya terjadinya kesalahan protap yang dilaksanakan pada saat dilakukan Penegakan Perda/Perkada, Minimnya Sarana dan prasarana yang dimiliki serta terbatasnya SDM terlatih yang dimiliki oleh Satpol PP.

Hasil dari pengukuran kinerja untuk indikator ini diperoleh capaian 100% hal tersebut dikarenakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda/Perkada.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024 DENGAN TRIWULAN II TAHUN SEBELUMNYA

Adapun untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai Standar Pelayanan minimal Perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2024 diperbandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut

.Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	TRIWULAN IV 2023			TRIWULAN IV 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan dasar SPM bidang Trantibum	68%	72,45	100%	74,45%	77,50%	100%

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023 dengan Tahun 2024 trendnya baik karena mengalami peningkatan . Hal tersebut dikarenakan hasil realisasi dan capaian dipengaruhi oleh capaian atas persentase SDM aparatur terlatih yang mengalami peningkatan dengan adanya Pelatihan Huru Hara sebanyak 25 orang yang dilaksanakan pada triwulan ini.selain itu peningkatan tersebut juga dipengaruhi capaian Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mengalami peningkatan dengan adanya pengadaan beberapa peralatan kantor yang diadakan pada triwulan II. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin (A) untuk mengukur kinerja ini maka Formulasi perhitungannya adalah :

$$\text{Y} = a+b+c+d \text{ dimana}$$

- a. Persentase SDM aparatur terlatih
- b. Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar
- c. Persentase SOP Bidang Trantibum
- d. Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada

Berikut kami sajikan tabel realisasi Tahun 2024 4 (empat) komponen pengukur indikator kinerja sasaran ini :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Pengukuran Kinerja Tahun Triwulan IV tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM aparatur Terlatih	78,82%	62,34%	79,09%
2	Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar	55,20%	47,68%	86,37%
3	Persentase SOP Trantibum yang dipenuhi	40	40	100%
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas indikator yang belum ada sama sekali capaiannya ada persentase SOP Bidang Trantibum yang dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan penyusunan SOP ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024. Sementara untuk capaian indikator lain masih berdasarkan realisasi Tahun 2024 karena pelaksanaan kegiatan di Triwulan II belum berjalan.

Sedangkan capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Pengukuran Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM Aparatur Terlatih	62,52	52,22	83,53%

2	Persentase Sarana dan prasarana sesuai standar	40,46	37,59	92,88%
3	Persentase SOP Bidang Trantibum	20	20	100%
4	Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100	100	100%

Seperti halnya dengan capaian kinerja pada tahun 2024 demikian pula dengan capaian kinerja pada Tahun 2024. dikarenakan pelaksanaan kegiatan belum berjalan di Triwulan IV Tahun 2024 maka realisasi kegiatan masih berdasarkan realisasi Tahun lalu kecuali untuk SOP yang juga di Triwulan IV belum dilaksanakan sedangkan persentase warga Negara yang terkena dampak akibat penagakan hukum perda/perkada sampai dengan Triwulan IV belum ada di temukan sehingga capaiannya 100% namun, triwulan selanjutnya data tersebut bisa saja berubah bila ditemukan adanya warga Negara yang terkenan dampak tersebut.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
----	-------------------	--------------------------------------	------------------------

1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM Bidang Trantibum	77,75%	73,75 %
---	---	--------	---------

Berdasarkan tabel 3.8 diatas perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan target jangka menengah menunjukkan tren yang positif dimana terus mengalami peningkatan. Namun, karena ini realisasi Triwulan IV berarti ada kemungkinan pada akhir Triwulan IV target Jangka menengah ini bisa saja dapat dilampaui mengingat, ada 3 (tiga) dari 4(empat) komponen pengukur indikator ini belum terlaksana di Triwulan IV.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL

Berdasarkan Lakip Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sasaran maupun indikator yang digunakan berbeda dengan sasaran dan indikator kinerja yang digunakan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur sehingga untuk sasaran dan indikator kinerja ini tidak dapat di perbandingkan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk Mencapai Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan standar Pelayanan Minimal” dengan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan SPM Bidang Trantibum” dimana target yang di tetapkan sebesar 74,45% dan terealisasi 77,75% maka berikut analisis factor-faktor yang yang menjadi kendala dalam pencapaian target tersebut:

- Adanya Perubahan Mutu SPM pada indikator Persentase SDM Aparatur terlatih dimana kategori SDM terlatih di ukur berdasarkan jumlah Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar sementara pelatihan teknis latihannya tidak masuk dalam kategori. Dan bila hal tersebut ditindaklanjuti maka persentase SDM aparatur terlatih akan mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan belum ada Tenaga Upah jasa yang mengikuti diklat dasar. Menyikapi permasalahan diatas perhitungan persentase SDM aparatur terlatih belum dilakukan perubahan dan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Satpol PP Prov sulsel. Selain itu juga dilakukan pengusulan peserta diklat dasar dari satpol PP kab. Luwu Timur ke Satpol PP Provinsi Sulawesi selatan.
- Terdapat jabatan struktural eselon IV yang lowong pada Bidang SDM dan sarana Prasarana sehingga pelaksanaan Tupoksi pada bidang tersebut tidak maksimal karena hanya di laksanakan oleh 3 (tiga) orang ASN yang terdiri dari 1 orang kepala Bidang, 1 orang kepala seksi dan 1 orang pejabat Fungsional. Menyikapi hal tersebut, telah diusulkan Pengisian Formasi jabatan yang masih Lowong kepada Bupati Luwu Timur melalui Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.511.789.050** dengan realisasi sebesar **Rp. 332.707.593** atau dengan rata-rata 65,00 %. pengukuran efisiensi atas sumber daya yang belum dapat dilakukan mengingat pelaksanaan kegiatan belum berjalan sepenuhnya dan belum selesai dilaksanakan.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan pada poin (F) program yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum . pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi Manuasi.
Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase SDM aparatur terlatih yang merupakan salah satu pemenuhan mutu dari Standar Pelayanan Minimal
 - Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.
Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan standar pelayanan minimal
 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat
Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketenteraman dan

Ketertiban Umum yang dipenuhi, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal

- Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan Perkada

Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hokum perda/Perkada . sub kegiatan ini merupakan standar teknis layanan SPM dalam layanan ganti rugi kerusakan materiil dan layanan pengobatan.

- Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seringkali membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Dengan berkoordinasi antar lembaga,penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif. Kerjasama dan koordinasi yang baik memeungkinkan pertukaran informasi,suber daya dan strategi antar lembaga dan kemitraan untuk mencegah dan menaganai gangguan trantibum secara efektif

- Pembinaan pegawai negeri Sipil(PPNS) kabupaten/kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
Sub kegiatan ini mendukung pencapaian SDM PPNS yang berkompeten. PPNS Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada.

**Sasaran
Strategis 2**

**Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
Umum sesuai standar**

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Masih dengan tujuan yang sama dengan sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif”

Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yang digunakan yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/ Kepala Daerah
2. Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berikut analisis masing-masing indikator:

Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah
------------------	--

Indikator ini menunjukkan tingkat penurunan angka pelanggaran peraturan Daerah/Kepala Daerah. adapun formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah :

$$\% = (a-b) : a \times 100\%$$

a : jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun sebelumnya

b : jumlah pelanggaran perda/Perkada Tahun ini

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	11,11 %	11,09 %	99,81%

Bila dimasukkan kedalam formulasi perhitungan hasil pada tabel 3.10 di atas diperoleh dari :

a : jumlah pelanggaran perda Tahun 2023 sebanyak 856 kasus

b : jumlah Pelanggaran Perda Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 568 kasus

$$\text{sehingga } \% = (856 - 761) / 856 \times 100\%$$

$$= 95/856 \times 100\%$$

$$= 11,09 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut target 11,11% dan realisasi 11,09 % itu berarti realisasi masih tinggi dibanding dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena untuk Triwulan IV jumlah kasus yang ditemukan masih sedikit sehingga capaian kinerja menjadi tinggi.

Tabel 3.10

Data Pelanggaran Perda/Perkada s.d Triwulan IV Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	-	-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	4	-	4
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	-	-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	-	-	-
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	336	336	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
7	Pemeliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	-	-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan		-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	104	104	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	209	209	
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021	-	-	
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014	108	108	
JUMLAH			761	757	4

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

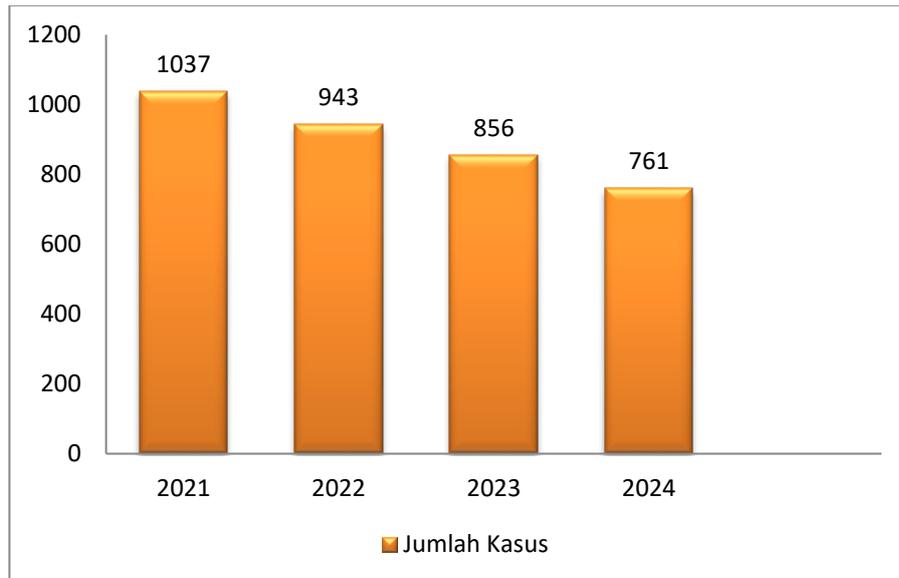
Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dengan
Tahun Triwulan IV Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	Triwulan IV Tahun 2023			Triwulan IV Tahun 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	10	9,22%	92,20%	11,11	11,09%	99,81%

Berdasarkan tabel 3.11 diatas, realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan IV Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,87 % , sementara bila dilihat dari capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 7,61%. Pada Triwulan IV Tahun 2023 Jumlah Kasus yang di laporkan dan ditangani sebanyak 856 Kasus dan pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami penurunan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 761 Kasus sebagaimana data pelanggaran perda pada tabel 3.10 diatas.

Grafik 1.1
Data Pelanggaran Perda
Tahun 2021-2024



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.12

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	11,09%	14,28%

Berdasarkan tabel 3.12 diatas antara realisasi Triwulan IV tahun 2024 dengan Target jangka menengah menunjukkan angka yang sangat signifikan karena jumlah kasus yang di laporkan pada Triwulan IV Tahun 2024 masih sedikit dan perbandingan dengan target jangka menengah ini seharusnya dilakukan di akhir Tahun 2024 untuk melihat perbandingan yang wajar.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL/NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional/Regional tidak dapat di sajikan. Mengingat sasaran dan indikator yang di miliki kab/Kota se Sulsel berbeda-beda sehingga untuk mengukur perbandingan itu juga tidak dapat dilakukan.

E. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang aktifitas
Sebagaimana telah dibahas pada sasaran 1 indikator 1 di atas sarana dan prasarana yang tersedia baru terpenuhi sekitar 47,33 % dari jumlah sarana prasarana standar yang harus dipenuhi. Salah 1 (satu) contoh sarana prasarana yang sangat di butuhkan saat ini adalah kendaraan operasional roda empat minibus untuk bisa lebih memudahkan pelaksanaan operasi yang sifatnya sidak sementara kendaraan roda empat yang tersedia saat ini adalah kendaraan roda empat dengan bak terbuka. Sehingga sasaran operasi lebih cepat mengetahui adanya operasi dan operasi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pinjam pakai ke OPD lain atau sewa ,selain itu mengusulkan dalam perencanaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.
- Anggaran yang dikelola pada bidang penegakan peraturan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Cukai tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan rokok illegal dan cukai tembakau.
Menyikapi hal tersebut, pada penyusunan renja Perubahan TA. 2024 diusulkan Penambahan anggaran yang bersumber dari APBD Murni agar kegiatan operasional penegakan perda lainnya

diluar penegakan hukum pelanggaran rokok ilegal dan cukai tembakau dapat dilaksanakan secara maksimal.

- Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.430.284.401** dengan realisasi sebesar **Rp. 430.205.309** atau dengan rata-rata 99,98 %. untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dapat dilakukan apabila semua kegiatan telah terlaksana dan dapat di lihat pada akhir Tahun 2024 pada saat penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2024.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan ini focus kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah/Kepala Daerah kepada masyarakat yang secara rutin dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 183.750.640 dan terealisasi sebesar Rp.183.703.778.

- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan ini focus kegiatannya sesuai dengan nama sub kegiatannya yaitu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Dengan anggaran sebesar Rp. 116.080.861 dan terealisasi sebesar Rp. 116.064.671.

- Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub kegiatan ini pelaksanaan kegiatannya berupa penyelidikan dan penyidikan kasus, operasi penegakan perda/Perkada dan proses penegakan hukum perda/Perkada hingga ke pengadilan (bila ada). Dengan anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 130.452.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.436.860,-

Indikator	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum
------------------	---

Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum, yang dimaksud dalam indikator ini adalah 16 (Eam Belas) tertib yang termuat dalam perda Kabupaten Luwu Timur nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum. 16 (enam belas) tertib tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tertib Bangunan
2. Tertib Jalan
3. Tertib Lingkungan
4. Tertib Pendidikan
5. Tertib jalur hijau,taman dan tempat umum
6. Tertib pedagang kreatif lapangan(PKL) dan pasar
7. Tertib pemeliharaan ternak
8. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
9. Tertib aparaturn sipil Negara
10. Tertib Sosial
11. Tertib Kesehatan
12. Tertib angkutan sungai dan angkutan darat
13. Tertib social
14. Tertib sungai, drainase dan pesisir pantai
15. Tertib pendaratan ikan
16. Tertib Usaha Tertentu

Adapun untuk mengukur indikator ini digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \{(a-b) : a\} \times 100\% \text{ dimana}$$

a : jumlah gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Tahun lalu sebanyak 378 kasus

b : jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sampai dengan Triwulan IV tahun ini sebanyak 336 kasus

A. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	11,11 %	11,11 %

Dari tabel 3.13 diatas realisasi kinerja diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan yaitu :

$$\begin{aligned} \% &= (378-336) : 378 \times 100\% \\ &= 42 : 378 \times 100\% \\ &= 11,11 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 sudah sesuai dengan target.

Berikut Data gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 3.14

Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2024

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam sekolah; Pelajar mabuk lem dan obat-obatan	108	108	Memberikan pembinaan fisik dan surat pernyataan tidak mengulangi; orang tua dan guru dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Spanduk dan Jenis Iklan/Media Informasi pada Pohon, Tiang Listrik dan Fasilitas umum lainnya	62	62	Menurunkan/mencabut APK, Baliho dan Spanduk serta bentuk Iklan/Media Informasi lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan keindahan.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Berjualan pada bahu jalan	61	61	Memberikan pemahaman (persuasif) agar tidak menjual pada bahu jalan; bersama-sama pemilik memindahkan lapak dan barang dagangan ketempat yang sesuai dengan aturan.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-	-	-
5	Tertib Lingkungan	Pemasangan APK di fasilitas umum	40	40	Menertibkan sejumlah baliho yang terpasang bukan pada tempatnya
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	-	-	-	-
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	Adanya pemanfaatan badan jalan yang tidak sesuai aturan	37	37	Memberikan teguran lisan kepada para pelanggar
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Adanya mobil yang mengangkut material tanpa menggunakan terpal penutup	17	17	Memberikan teguran lisan kepada sopir mobil untuk menggunakan penutup terpal pada saat mengangkut material
14	Tertib drainase	-	-	-	-
Jumlah			336	336	

Sumber: Bidang Trantibumlinmas Satpol PP

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.15

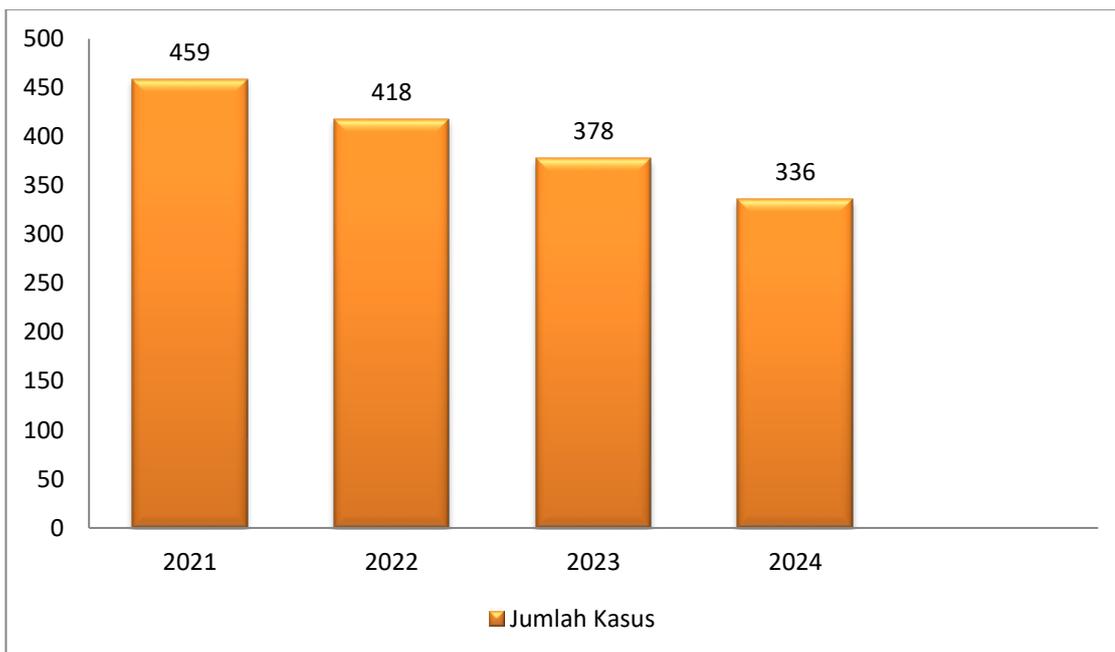
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Dan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2023			TRIWULAN IV TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	10	9,22%	92,20%	11,11	11,11%	100%

Berdasarkan tabel 3.15 di atas, bila dilihat dari sisi realisasi kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024 terjadi peningkatan angka penurunan gangguan Trantibum sekitar 1,89 % namun bila dari segi capaian kinerja antara tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi peningkatan capaian sekitar 7,20 %. Namun bila melihat dari target yang ada, realisasi dan capaian kinerja masih berada dalam kriteria sangat tinggi. Tingginya angka realisasi dan capaian kinerja ini disebabkan kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang ditemukan pada Triwulan IV masih sedikit sehingga menyebabkan angka realisasi berada diatas target yang telah ditetapkan.

Angka penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama 3 (Tiga) tahun terakhir menunjukkan tren positif yang dapat dilihat pada grafik berikut ;

Grafik 1.2
Data Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2021-2024



C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum	11,11 %	14,28%

Dari tabel diatas antara realisasi Triwulan IV tahun 2024 dengan target jangka menengah perbandingan yang di tunjukkan sangat jauh

berbeda antara realisasi Triwulan IV tahun 2024 dengan target jangka menengah. Hal tersebut disebabkan :

1. Temuan kasus pada Triwulan IV masih relative sedikit sehingga capaian kinerja akan sangat tinggi
2. Perbandingan yang wajar seharusnya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga akan lebih memudahkan pengukuran pencapaian dalam 1 (Satu) Tahun berjalan.

D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar regional maupun nasional tidak dapat dilakukan karena indikator pengukuran yang di gunakan Kab/Kota berbeda dengan indikator yang digunakan Kab. Luwu Timur.

E. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

- Beban kerja yang besar dalam 1(satu) bidang yang tidak didukung dengan SDM yang memadai menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan dalam bidang Ketenteraman dan ketertiban umum. Jumlah ASN dalam bidang ini berjumlah 4(empat) orang yang terdiri 1Orang kepala Bidang, 2 Orang Kepala Seksi dan 1 orang Pejabat Fungsional dan dibantu 2 orang tenaga upah jasa.

Menyikapi hal tersebut, dilakukan koordinasi dengan bagian Organisasi dan tata laksana untuk melakukan perubahan kelembagaan dengan memisahkan Perlindungan masyarakat dari Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan menjadi satu bidang yang berdiri sendiri.selain itu juga diusulkan pengisian formasi jabatan yang masih lowong pada bidang Trantibumlinmas.

- Masih Terdapat beberapa fasilitas Umum seperti Gedung olah Raga(GOR), Stadion, dan Bundaran batara Guru (BBG) yang belum memiliki Pos Jaga sehingga sangat rawan terjadi pengrusakn oleh oknum yang tidak bertanggungjawab bila tidak ada Penjagaan aset oleh satpol PP.

Menyikapi hal tersebut, Satpol PP melakukan Koordinasi dengan beberapa Instansi yang bertanggungjawab atas bangunan tersebut dan mengusulkan untuk membangun pos jaga pada fasilitas-fasilit umum tersebut.

- Belum Maksimalnya keterlibatan Satlinmas Desa

Satlinmas sebagai petugas yang paling dekat pelayanannya kepada masyarakat di harapkan keterlibatannya serta aktif dalam melakukan deteksi dan cegah dini gangguan trantibum Namun di beberapa desa masih terdapat satlinmas yang belum aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum. Bila semua satlinmas aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum maka tingkat penurunan gangguan trantibum akan meningkat.

Upaya yang dilakukan dalam mengaktifkan petugas perlindungan masyarakat ini adalah dengan membentuk petugas pemberdayaan satlinmas dan rutin melakukan monitoring dan evaluasi satlinmas di desa-desa.

- Minimnya anggaran operasional Satpol PP kecamatan

Dengan adanya penempatan Satpol PP di 11 (sebelas) kecamatan maka sejalan dengan itu disediakan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dikarenakan belum dibentuk UPT sehingga anggaran tersebut melekat pada anggaran bidang trantibumlinmas sehingga penyediaan anggarannya pun sangat terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan TAPD , mengusulkan penambahan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP kecamatan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar Rp.6.929.152.790 dengan realisasi sebesar Rp. 6.878.513.077 atau dengan rata-rata 99,26 % .perhitungan efisiensi anggaran belum dapat dilakukan mengingat seluruh kegiatan belum selesai dilaksanakan.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 4(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan. Kegiatan operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sumber anggarannya dari sub kegiatan ini. termasuk juga operasional petugas Satpol PP kecamatan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan asset, pengamanan kegiatan masyarakat serta pengawalan pejabat. Jumlah anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.631.253.940

- Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda/perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Sub kegiatan ini mengatur anggaran operasional untuk kegiatan penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.187.300,-

- Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat/kab. Kota

Sub kegiatan ini mengatur koordinasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi sulsel, pemerintah kecamatan dan desa.

Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 79.359.800.

- Sub kegiatan pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

Sub kegiatan ini mengatur kegiatan pemberdayaan Satlinmas didesa Desa/kelurahan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 118.351.750.

N



Pada sasaran strategis 3 yang merupakan Sasaran penunjang urusan diukur dengan indikator nilai Sakip. SS3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima. Sasaran ini sesuai yang tertuang dalam renstra dengan tujuan yaitu “Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah”

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sakip Satpol PP	75,50	Belum rilis	

Nilai Sakip diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Luwu Timur setiap tahunnya. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada Sakip 2023 namun evaluasi tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga belum ada realisasi yang dapat di tunjukkan untuk sasaran dan indikator ini.

Berikut ini adalah hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur Tahun 2022 yang dapat di tunjukkan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
B	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,40
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	225,00	14,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			75,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021(SAKIP TAHUN 2020)		TAHUN 2022(SAKIP TAHUN 2021)		TAHUN 2023(SAKIP TAHUN 2022)	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	NILAI SAKIP	62,19	95,76 %	65,44	99,90%	75,15	100,2%

Dari tabel di atas nilai saki PP Kab. Luwu Timur dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan baik dari segi realisasi kinerja maupun dari segi Capaian kinerja

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI DAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET JANGKA MENENGAH	STANDAR NASIONAL
1	Nilai Saki	75,15	85,00	

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, ke empat indikator Kinerja yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang baik antar SubBagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Kab. Luwu Timur .Dari analisis penyebab keberhasilan sebagai berikut :

- Pelaksanaan diklat perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan di Balai Diklat PKN Gowa tanggal 15 s.d 17 Mei 2024 yang diikuti oleh kasubag perencanaan dan keuangan
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti seluruh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Resiko dan register Resiko yang dilaksanakan di Kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.
- Coaching cilinik Reformasi birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 5.962.993.659 dengan realisasi sebesar Rp.5.678.167.446 atau rata-rata 95.22 %. untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dilakukan apabila seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan atau pada akhir Triwulan IV Tahun 2024.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur . Program ini didukung oleh 8 (Delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

1) Sub Bagian perencanaan dan keuangan sebanyak 2 (Dua) kegiatan yang terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 21 (dua Puluh Satu) sub kegiatan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Anggaran Satpol PP Tahun anggaran 2024 rincian anggaran sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 13.668.584.900,00 terealisasi sebesar Rp.13.198.073.425,00 atau 96,55%;
- b) Belanja Modal sebesar Rp. 188.635.000,00 terealisasi sebesar Rp. 121.520.000 atau 73,37%

1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga Triwulan IV Tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari denda berdasarkan keputusan pengadilan Rp. 0,-

- 2. Tahun 2024 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 13.834.219.900,00 terealisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 13.319.593.425,00 atau 96,28% dengan membiayai 2 (Dua) Program 11 (sebelas) kegiatan Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.962.993.659	5.678.167.446	95,22	284.826.213	4,78
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	138.097.000	119.474.849	86,52	18.622.151	13,48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.711.200	48.699.383	78,91	13.011.817	21,09
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.469.000	5.334.470	97,54	134.530	2,46
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.591.000	7.139.278	94,05	451.722	5,95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.325.800	58.301.718	92,07	5.024.082	7,93
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.668.256.809	4.566.994.853	97,83	101.261.956	2,17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.557.513.209	4.462.197.793	97,91	95.315.416	2,09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.960.000	36.560.000	98,92	400.000	1,08
Koordinasi dan penyusunan laporan	29.593.200	27.272.610	92,16	2.320.590	7,84

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
keuangan akhir tahun SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44.190.400	40.964.450	92,70	3.225.950	7,30
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.713.700	30.298.040	98,65	415.660	1,35
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.713.700	30.298.040	98,65	415.660	1,35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.821.050	77.008.250	59,32	52.812.800	40,68
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.026.800	7.568.380	83,84	1.458.420	16,16
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.274.500	20.408.370	87,69	2.866.130	12,31
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.927.750	1.560.000	39,72	2.367.750	60,28
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	93.592.000	47.471.500	50,72	46.120.500	49,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	591.352.700	530.787.455	89,76	60.565.245	10,24
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.015.600	7.411.350	74,00	2.604.250	26,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000	9.373.000	92,09	805.000	7,91

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Penyediaan bahan logistik kantor	6.150.000	4.980.000	80,98	1.170.000	19,02
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.195.000	7.155.000	58,67	5.040.000	41,33
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.840.000	8.290.000	84,25	1.550.000	15,75
Fasilitas Kunjungan Tamu	9.900.000	9.585.000	96,82	315.000	3,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.074.100	483.993.105	90,79	49.080.995	9,21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.735.000	96.570.000	88,00	13.165.000	12,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.735.000	96.570.000	88,00	13.165.000	12,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.758.400	71.560.649	82,48	15.197.751	17,52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.036.100	11.340.500	86,99	1.695.600	13,01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.472.300	53.970.149	86,39	8.502.151	13,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.250.000	6.250.000	55,56	5.000.000	44,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.259.000	185.473.350	89,06	22.785.650	10,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	15.100.000	14.711.260	97,43	388.740	2,57

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.050.000	122.814.090	99,81	235.910	0,19
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.990.000	25.790.000	66,15	13.200.000	33,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.720.000	15.065.000	90,10	1.655.000	9,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.399.000	7.093.000	49,26	7.306.000	50,74
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.871.226.241	7.641.425.979	97,08	229.800.262	2,92
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.375.899.290	7.176.063.610	97,29	199.835.680	2,71
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	79.359.800	77.625.083	97,81	1.734.717	2,19

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118.351.750	115.725.400	97,78	2.626.350	2,22
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	279.254.500	244.550.633	87,57	34.703.867	12,43
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	17.568.000	8.328.000	47,40	9.240.000	52,60
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10.294.000	9.839.000	95,58	455.000	4,42
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6.631.253.940	6.591.398.944	99,40	39.854.996	0,60
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui	100.187.300	93.763.650	93,59	6.423.650	6,41

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	9.835.000	4.642.900	47,21	5.192.100	52,79
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	129.795.000	30.190.000	23,26	99.605.000	76,74
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	430.284.401	430.205.309	99,98	79.092	0,02
sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	183.750.640	183.703.778	99,97	46.862	0,03
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	130.452.900	130.436.860	99,99	16.040	0,01
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	116.080.861	116.064.671	99,99	16.190	0,01

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	65.042.550	35.157.060	54,05	29.885.490	45,95
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	65.042.550	35.157.060	54,05	29.885.490	45,95
TOTAL BELANJA	13.834.219.900	13.319.593.425	96,28	514.626.475	3,72

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2024 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	MENINGKATNYA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	70,39%	SEDANG
1	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70,39%	Sedang
2	MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR	704,9%	SANGAT TINGGI
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah	311,68%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	302,79%	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capaian	387,3%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran Strategis pertama dengan Indikator **"Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum"** nilai capaiannya diangka **70,39%** dengan **Kriteria Sedang** sedangkan pada sasaran Strategis kedua dengan Indikator **"Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah"** capaiannya **302,79%** dan **"Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum"** dengan capaian **311,68%**.dengan kriteria Sangat Tinggi. Penyebab dari tingginya angka capaian untuk sasaran Startegis Kedua tersebut adalah masih rendahnya jumlah kasus yang ditemukan di Triwulan IV Tahun 2024.**semakin sedikit kasus yang ditemukan maka akan semakin tinggi capaian kinerja yang didapatkan.** Dengan demikian, rata-rata capaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2024 masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 20 Januari 2025

Kepala Satuan

The image shows a circular official stamp of the Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR' and 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU
TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Kesatu,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74,45%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	- Persentase penurunan pelanggaran perda/Perkada - Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	11,11% 11,11 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar **Rp. 7.952.095.501 ,-**
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 5.612.124.399,-**

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

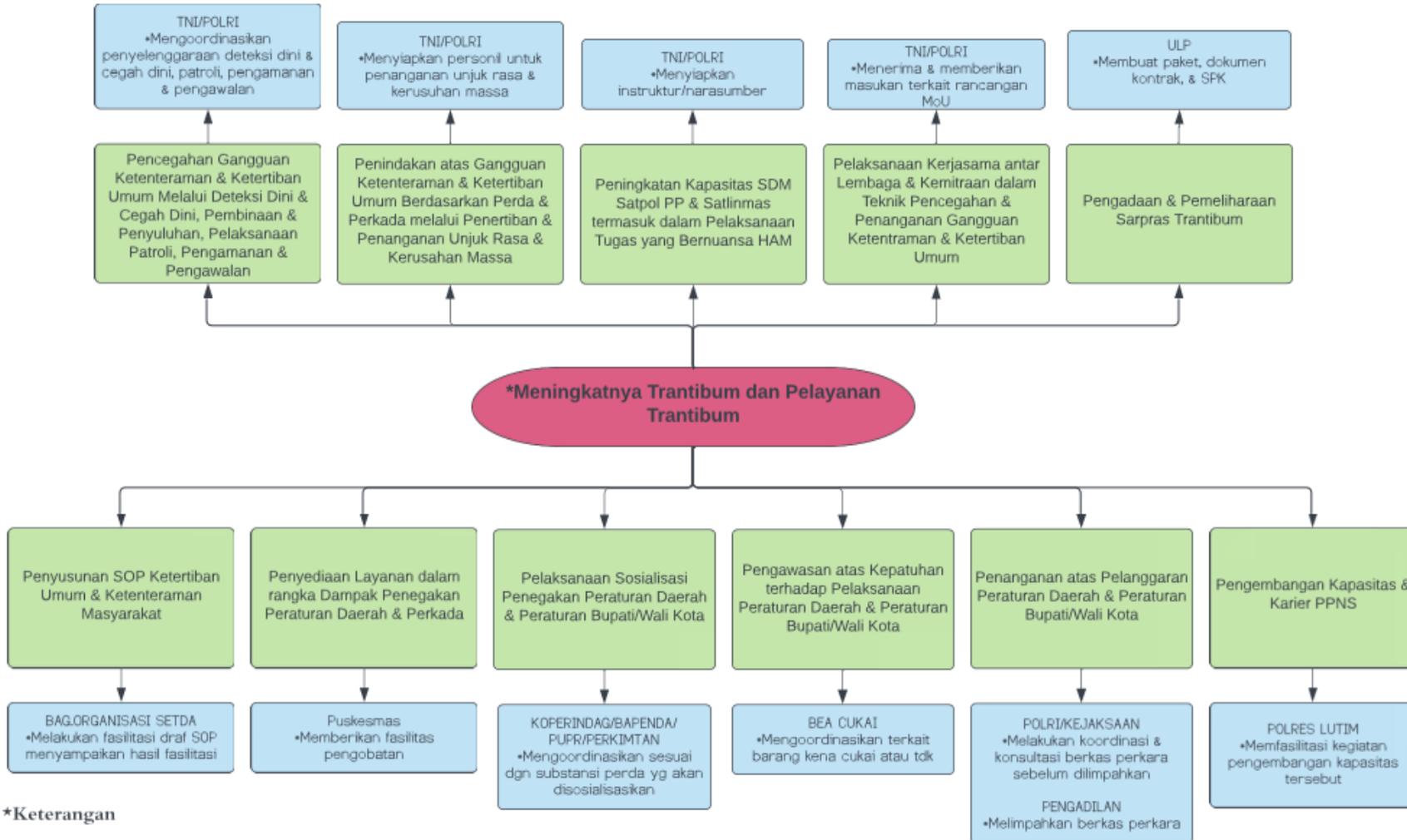
Pihak Kesatu



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN 2

CROSSCUTTING SATPOL PP KAB. LUWU TIMUR



PENGEKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Penegakan Peraturan Perda/Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	PERSEN	100	100	100	100	100	100

PEMISAHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000 orang	Penyidik PPNS	orang	0	0	0	0	0	0

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Terdapatnya acuan dalam penyusunan Laporan RP yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	Jumlah acuan RP yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	orang	387	216	216	216	216	216		
			Jumlah laporan acuan yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	0	23	23	23	23	23	
				Jumlah acuan yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	0	185	185	185	185	185
					0	1	1	1	1	1
Jumlah acuan yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	orang	0	10	10	10	10	10			

Kidneme enter Lembaga dan Kesehatan dalam Taktik Pencegahan dan Penegangan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kerjasama dalam rangka dalam penanganan gangguan ketertiban dan keamanan (Columen)	Jumlah kerjasama penanganan gangguan ketertiban dan keamanan (Columen)	Berkas	0	2	2	2	2	2
			0	2	2	2	2	2

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terdapatnya Sarana dan Prasarana Ketertiban	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Unit)	unit	0	50	50	50	50	50	
			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Unit)	0	2	5	3	0	0
				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Unit)	0	1	2	3	3
Jumlah sarana dan prasarana ketertiban dan ketertiban umum yang dibutuhkan (Unit)	unit	0	0	13	13	100	240	302	

Persiapan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya SOP Ketertiban	Jumlah dokumen SOP ketertiban dan ketertiban umum yang dibutuhkan (Columen)	Berkas	10	20	20	20	20	20
			10	20	20	20	20	20

Penyediaan Layanan dalam rangka Ompang Pengawasan Peraturan Daerah dan Perkada

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya SPU Transkrib	Jumlah layanan yang sudah tersedia dan siap untuk digunakan (Unit)	unit	0	5	5	5	5	5
			0	5	5	5	5	5

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terdapatnya sosialisasi Perda dan Perkada	Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada yang dibutuhkan (Unit)	unit	0	40	40	40	40	40	
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan yang memenuhi standar (orang)	0	2300	2300	2300	2300	2300
				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan yang memenuhi standar (Unit)	0	23	23	23	23

Pengawasan dan Pemeliharaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terdapatnya pengawasan atas pelaksanaan Perda dan Perkada	Jumlah pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada yang dibutuhkan (Unit)	unit	0	60	60	60	60	60	
			Jumlah pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada yang dibutuhkan (Unit)	0	22	22	22	22	22
				Jumlah pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada yang dibutuhkan (Unit)	0	44	44	44	44

Pengawasan dan Pemeliharaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya pengawasan atas pelaksanaan Perda dan Perkada	Jumlah pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada yang dibutuhkan (Unit)	unit	0	43	43	40	35	30
			Jumlah pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada yang dibutuhkan (Unit)	0	15	13	11	9



PPNs yang berkomponen	Persentase PPNs yang berkomponen	PERSEN	57,14	75	87,50	100	100	100
-----------------------	----------------------------------	--------	-------	----	-------	-----	-----	-----

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya PPNs yang berkomponen	Jumlah PPNs yang mendapat Deklarasi Pengembangan Kapasitas	orang	7	3	3	3	3	3
			2	4	4	4	4	4
Jumlah PPNs yang melaksanakan (Pial)	orang	-	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1

TUJUAN SKPD

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI (T4)

INDIKATOR KINERJA	SAT	KORONG KINERJA	KUNDUR TERLAMBAT
INDEKS REFORMASI BIKROKRASI (IRB)	PREDIKAT	CC	A

SASARAN SKPD

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan publik (peningkatan skor Peringkat Daerah)	persen	7,69	9,1	10	11,11	12,5	14,28

PROGRAM SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan	Persentase pemangku urusan perangkat daerah tingkat sesuai standar	Jumlah kuesioner tertinggi sesuai PD Standar sesuai standar (jumlah seluruh pemangku urusan PD x 100)	PERSEN	100	100	100	100	100	100

KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terperuhnya pelaksanaan perencanaan dan evaluasi dengan baik	Persentase dokumen perencanaan yang terakumulasi dan tidak tepat waktu	PERSEN	100	100	100	100	100	100

SUB KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	2	2	2	2	2
			2	1	1	1	1	1
Terwujudnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
Terwujudnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
Terwujudnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
Terwujudnya dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
Terwujudnya dokumen capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3
			3	3	3	3	3	3
Terwujudnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	8	8	8	8	8
			8	8	8	8	8	8

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Administrasi keuangan yang terintegrasi dengan baik	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kinerja ASN yang pial dan terintegrasi dengan baik	Jumlah ASN yang pial dan terintegrasi dengan baik	Orang	0	41	41	51	51	51
			41	41	51	51	51	51
Terwujudnya pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (P)	Persentase pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (P)	Persen	0	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100
Pembinaan pelaksanaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Persentase pelaksanaan pembinaan pelaksanaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Persen	0	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD	Persentase pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD	Persen	0	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100

Terwujudnya administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran SKPD yang dibuat	Dokumen	0	4	4	4	4	4	4
Pengadaan dan pemyapan Bahan Tanggapan Pembebasan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
terbentuknya bahan tanggapan pembebasan	Persentase pembebasan bahan tanggapan pembebasan	Persenan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
			0	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan berbasis/terintegrasi/ terintegrasi-SKPD yang dibuat tepat waktu	Persenan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
			12	12	12	12	12	12	12
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan dan analisis progress realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis progress realisasi anggaran yang dibuat (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Laporan	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terwujudnya administrasi BMD yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase BMD yang dilaksanakan sesuai dengan standar	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang dibuat (Dokumen)	Dokumen	0	2	2	2	2	2	2
Realisasi dan Penyediaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan hasil realisasi barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil realisasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang dibuat	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang dibuat	Dokumen	4	12	12	12	12	12	12

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Laporan	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terwujudnya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kualitas kerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya pakan dinas beserta akibat kelangkaannya	Jumlah pakan dinas beserta akibat kelangkaannya yang dibuat	Sal	200	200	0	207	0	275	275
Perbaikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya laporan data administratif kepegawaian	Jumlah laporan data administratif kepegawaian yang dibuat	Laporan	0	4	4	4	4	4	4
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang ikut berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0	47	47	47	47	47	47
Sertifikasi Pegawai Perundang-undangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi perundang-undangan	Orang	44	47	47	47	47	47	47
Kelembagaan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	4	10	10	10	10	10	10
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	Dokumen	-	5	5	5	5	5	5

Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Laporan	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terwujudnya Administrasi Umum	Persentase Kapasitas Kinerja Administrasi Umum	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

Penyediaan Kumpulan 3 (Tabel) Lembar/Perovengan Anggaran Kantor									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						

		2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Terdapatnya komponen rencana fisik perencanaan anggaran belanja yang disediakan	Jumlah komponen rencana fisik/perencanaan anggaran belanja yang disediakan	jenis	182	165	177	168	190	200				
Penyediaan Perlatan Rumah Tangga												
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya perlatan rumah tangga	Jumlah perlatan rumah tangga yang disediakan (Lini)	Unit	169	191	210	235	255	270				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	jenis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan												
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya bahan baku dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan baku dan peraturan perundang-undangan	Diorganisa	5	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Fasilitas Koneksi Tera												
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya mesin dan/atau alat	Jumlah mesin yang disediakan	Orang	361	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terakumulasinya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang direncanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang direncanakan	hal	361	275	275	275	275	275	275	275	275	275

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya BMD-PD penunjang yang tersedia	Presentase BMD-PD penunjang yang tersedia	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Unit	0	0	2	2	2	2
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya perlatan dan mesin lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	24	32	40	40	40	40
Pengadaan Aset Tak Berwujud								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya aset tak berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Lini)	Unit	0	0	1	1	1	1
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Lini)	Unit	1	0	5	5	5	5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Lini)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Lini)	Unit	0	0	1	1	1	1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Lini)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Lini)	Unit	0	1	1	1	1	1

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Penyediaan Jasa Survei Monev								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya surat monev dan keluar yang dilaksanakan	Jumlah surat monev dan keluar yang dilaksanakan	Surat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang dibayarkan	Rekening	36	34	36	36	36	36
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang dibayarkan	Rekening	36	34	36	36	36	36

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya pemeliharaan barang milik daerah dengan baik	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan ongkosnya	Unit	39	25	30	32	34	36
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	76	100	100	100	150	150
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2	2	2	2	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya sarana dan peralatan gedung kantor dan/atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan peralatan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	7	7	7	7	7